

# RENCANA KERJA TAHUN 2022



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (**Renja-PD**), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil Perangkat Daerah sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Rencana pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (**RKPD**) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD ;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (**Renstra-PD**) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan

mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) dan laporan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provsu Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja BPKAD Provinsi Sumatera Utara, selaras dengan Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Proses perencanaan dan penyusunan rancangan APBD, mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar tahapan sebagai berikut:

- (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
- (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan
- (6) penetapan APBD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Renstra OPD Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan tujuannya adalah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
3. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
4. Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
5. Pagu indikatif program, kegiatan dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022
- 4.3 Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
- 4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
- 4.5 Indikator Kinerja Utama OPD

### **BAB. V. P e n u t u p**

## **B A B I I**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja PD tahun 2020 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

##### **a. Evaluasi Anggaran Program dan Kegiatan**

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tersedia anggaran belanja yang berguna untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Jenis kelompok belanja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. belanja tidak langsung, dan
2. belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik, Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu sesuai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, terdapat Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 41.664.722.039,28 dengan realisasi sebesar Rp. 37.355.373.435,00 atau 89,66%.

1. Belanja Tidak Langsung pagu sebesar Rp. 16.479.559.082,28 dan realisasi sebesar Rp. 15.889.778.584,00 atau 96,42%
2. Belanja Langsung pagu sebesar Rp. 25.185.162.957,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.465.594.851,00 atau 85,23%.

Rincian belanja program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel. 2.1.**

**Tabel. 2.1**  
**Rincian Program dan Kegiatan dan Pagu dan Realisasi**  
**Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>16.479.559.082,28</b>	<b>15.889.778.584,00</b>	<b>96,42%</b>
	Gaji dan Tunjangan	8.079.559.082,28	7.750.213.055,00	95,92%
	Tambahan Penghasilan PNS	8.400.000.000,00	8.139.565.529,00	96,90%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>25.185.162.957</b>	<b>21.465.594.851</b>	<b>85,23%</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.448.286.990</b>	<b>3.883.085.416</b>	<b>87,29%</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	89.000.000	85.053.000	95,57%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.500.000	32.140.990	55,90%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	179.000.000	140.874.000	78,70%
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	39.066.795	78,13%
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran/keuangan	1.529.230.000	1.229.900.000	80,43%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000.000	286.441.190	95,48%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.452.900	248.307.000	82,64%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangang-Undangan	34.100.000	20.579.500	60,35%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	508.906.690	431.951.000	84,88%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1.199.247.400	1.167.921.941	97,39%
	Penyediaan jasa kebersihan	97.500.000	97.500.000	100,00%
	Penyediaan jasa keamanan	103.350.000	103.350.000	100,00%

<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.649.202.750</b>	<b>2.459.076.330</b>	<b>92,82%</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.327.750	186.150.000	97,80%
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	261.475.000	224.059.903	85,69%
	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD	2.197.400.000	2.048.866.427	93,24%
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>172.100.000</b>	<b>165.450.000</b>	<b>96,14%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	103.200.000	96.550.000	93,56%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	0,00%
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	68.900.000	68.900.000	100,00%
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>332.801.497</b>	<b>316.107.497</b>	<b>94,98%</b>
	Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	-	-	0,00%
	Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	-	-	0,00%
	Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	6.830.000	5.136.000	75,20%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	247.791.200	247.791.200	100,00%
	Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	41.180.297	26.680.297	64,79%
	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemprov	-	-	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.000.000	36.500.000	98,65%

06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.079.534.450	1.981.440.497	95,28%
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja	-	-	0,00%
	Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD	-	-	0,00%
	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	154.434.800	150.934.800	97,73%
	Pengelolaan Pajak PPN dan PPh	250.438.750	231.800.000	92,56%
	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya	140.830.000	115.727.500	82,18%
	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	523.495.600	520.491.436	99,43%
	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov	104.854.800	100.080.501	95,45%
	Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	56.450.000	50.730.000	89,87%
	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	0,00%
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	573.590.000	544.399.360	94,91%
	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	193.980.500	193.648.400	99,83%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	81.460.000	73.628.500	90,39%
	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	-	-	0,00%
	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD	-	-	0,00%

<b>17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.910.044.700</b>	<b>2.405.178.303</b>	<b>82,65%</b>
	Pengadaan BMD Mepedomani Standar Barang dan Standar Kebutuhan	92.938.800	43.032.000	46,30%
	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD, dan DKPBMD	93.982.000	55.052.200	58,58%
	Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	45.760.000	38.129.730	83,33%
	Penetapan dan Pengalihan Status BMD	127.055.600	112.100.800	88,23%
	Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada BMD	670.009.000	654.302.600	97,66%
	Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	201.914.000	169.425.000	83,91%
	Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu	283.143.200	239.996.940	84,76%
	Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	203.439.600	179.548.300	88,26%
	Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov	690.070.700	521.521.223	75,58%
	Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah	84.762.000	81.920.000	96,65%
	Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprov Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember	67.258.000	62.980.940	93,64%
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	86.526.800	40.733.400	47,08%
	Visitasi Tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan Pemda Sesuai Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	-	-	0,00%
	Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang	47.662.400	18.450.000	38,71%
	Pengamanan Aset Milik Pemprov Yang Bermasalah	215.522.600	187.985.170	87,22%

<b>39</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>12.593.192.570</b>	<b>10.255.256.808</b>	<b>81,43%</b>
	Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprov	357.273.460	337.773.460	94,54%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	-	-	0,00%
	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	1.034.741.980	893.978.751	86,40%
	Pengelolaan Cash Management System (CMS) Terintegrasi Dengan E-Keuangan Dalam Penatausahaan Keuangan	172.250.000	172.250.000	100,00%
	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
	Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota	82.562.000	81.876.600	99,17%
	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota	49.310.970	28.310.970	57,41%
	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut	52.000.000	9.300.000	17,88%
	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	4.445.233.860	3.033.243.271	68,24%
	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	4.156.157.300	3.624.598.926	87,21%
	Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan	1.680.500.000	1.567.274.000	93,26%
	Rekonsiliasi dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab/Kota	208.784.000	198.811.500	95,22%
	Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	36.399.000	35.739.330	98,19%
	Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi APBD / Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	-	-	0,00%
	Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	0,00%
	Penyimpanan Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD	231.830.000	188.450.000	75,71%
	Pengelolaan Dokumentasi dan Konten Website BPKAD	86.150.000	83.650.000	97,10%
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG</b>	<b>42.384.954.957</b>	<b>37.355.373.435</b>	<b>88,13%</b>

Adapun kegiatan yang tidak terealisasi anggaran belanjanya karena dilakukan refocusing terhadap anggaran Perangkat Daerah yang direalokasikan ke Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk menanggulangi masalah Pandemi Covid-19.

Dalam rangka pelaksanaan Refocusing dan Realokasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Refocusing antara lain :

1. Refocusing Tahap I melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (3 April 2020). Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 57.657.143.800 menjadi Rp. 49.008.572.060 atau direfocusing sebesar 15% dari APBD;
2. Refocusing Tahap II melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (14 Mei 2020). Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 57.657.143.800 menjadi Rp. 23.960.288.957 atau direfocusing sebesar 58,44% dari APBD.

## **b. Evaluasi Capaian Kinerja**

Evaluasi capaian kinerja mengacu pada evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan masa periode tertentu. Pada evaluasi capaian kinerja ini dengan menggunakan masa periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.

Pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.2 (tabel T-C.29)**.

Tabel 2.2 (Tabel T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja SKPD Program (Renstra P-D) Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
			Target	Unit	Realisasi	Unit	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8= (7/6)	9			
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentasi Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran</b>	98	%	91	%	98	%	99	%	98,98				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat, Dokumen, Paket dan Barang Terbayar	80.750	surat	8.437	surat	3200	surat	3200	surat	100,00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lokasi pengguna Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik yang Terbayar	20	Tempat	4	Tempat	4	Tempat	4	Tempat	100,00				
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diservis	60	bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Penyediaan Jasa perizinan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Berizin	725	unit	22	unit	30	unit	28	unit	93,33				
	Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran/keuangan	Persentase Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan dibayarkan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ATK Yang Dibeli sesuai kebutuhan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Yang Dicitak dan Digandakan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Persentase Bahan Bacaan Yang Dibeli Per Bulan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia Untuk Tamu dan ASN	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat Koordinasi Yang Dihadiri	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				
	Penyediaan Jasa kebersihan	Jumlah Kebersihan Yang Dibayar Setiap Bulan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00				

SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Keamanan Yang Dibayar Setiap Bulan	60	bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00						
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentasi Tingkat Kondisi Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>94</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>102,04</b>						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	5	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservis	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00						
	Penyediaan Jasa Sewa gedung sementara BPKAD	Persentase Pembayaran Sewa Gedung Per tahun	100	%	0	%	100	%	100	%	100,00						
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya efektifitas dan produktifitas layanan</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>102,04</b>						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Diadakan	5	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Diadakan	5	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00						
	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian BPKAD	Persentase administrasi kepegawaian ASN BPKAD yang dikelola	60	bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00						
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentasi peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>102,04</b>						
	Bimbingan teknis sistem online penerimaan daerah	Persentase Bendahara Penerimaan mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	5	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!						
	Sosialisasi pajak PPN dan PPH pasal 22,23, final pasal 4 ayat 2	Persentase Bendahara Pengeluaran mengikuti Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, FinaD32:D37I Pasal 4 Ayat 2	5	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!						

	Sosialisasi sisduur pengelolaan keuangan daerah tentang peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah	Persentase ASN pengelola keuangan mengikuti sosialisasi Sisduur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	5	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!	SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	Sosialisasi peraturan perundang undangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada kab/kota	Persentase Kab/Kota mengikuti Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	5	Kegiatan		Kegiatan	100	Kegiatan	100	Kegiatan	100,00	
	Pelatihan dan bintek tatacara evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD mengikuti Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Kegiatan		0	100	Kegiatan	100	Kegiatan	100,00	
	Whorshop penyusunan Laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemprov	Persentase OPD mengikuti Worshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruual di Lingkungan Pemprov	5	Kegiatan		Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase Peningkatkan SDM Aparatur BPKAD	750	Orang	2	Orang	100	Orang	100	Orang	100,00	
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentasi dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>102,04</b>	
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian dokumen penetapan kinerja	Jumlah Dokumen Lakip dan Dokumen Penetapan Kinerja Tepat Waktu	10	dokumen	-	0	2	dokumen	2	dokumen	100,00	
	Penyusunan Anggaran kas pemprov APBD dan perubahan APBD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemprov APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu	10	kegiatan	-	0	2	dokumen	2	dokumen	100,00	

	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	5	Laporan	1	Laporan	12	dokumen	12	dokumen	100,00	SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
	Pengelolaan pajak PPN dan PPH	Persentase peningkatan SDM pengelola Pajak PPN dan PPH Sesuai Dengan Ketentuan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	Penyusunan laporan realisasi semester 1 APBD serta prognosis 6 bulan berikutnya	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya yang disusun Tepat Waktu	5	dokumen	0	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00		
	Pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dengan Baik	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemprov	Persentase Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov sesuai SAP	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	Rekonsiliasi laporan fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran	Jumlah OPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Tepat Waktu	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD Yang Menghadiri Diklat	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	Penyusunan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tepat Waktu	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00		
	Penatausahaan belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja keuangan	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00		
	Penyusunan pelaporan keuangan BPKAD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPKAD yang tersusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00		

	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada BPKAD	Persentase kelengkapan dokumen Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	0	%	-	%	100	%	100	%	100,00						
	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan pada BPKAD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Pada BPKAD yang Ditindaklanjuti	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00						
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>101,43</b>	<b>%</b>	<b>103,50</b>						
	Pengadaan BMD mempedomani standar barang dan standar kebutuhan	Jumlah Pergub BMD yang berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan	750	Buku	150	Buku	150	Buku	150	Buku	100,00						
	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	Jumlah OPD dievaluasi tentang RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	245	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	100,00						
	Evaluasi laporan realisasi pengadaan barang belanja langsung	Jumlah Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	260	Dokumen		Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	100,00						
	Penetapan dan pengalihan status BMD	Jumlah dokumen OPD Pemanfaatan Penetapan Status BMD	260	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	100,00						
	Pengelolaan aset dan barang persediaan menggunakan aplikasi simbada BMD	Jumlah OPD melakukan pengelolaan Aset dan Barang Persediaan melalui Aplikasi Simbada BMD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	100,00						
	Penaksiran/penilaian dalam rangka penjualan barang milik daerah provinsi Sumatera Utara	Jumlah kegiatan Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	260	Dokumen	49	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00						
	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah provsu	Persentase SK Gubsu tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yang selesai	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00						
	Monitoring tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	Persentase LHP BPK RI yang ditindak Lanjuti	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00						
	Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik pemprov	Persentase Sertifikasi Tanah Yang Diselesaikan	100	%	15	%	20	%	24	%	120,00						

SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

	Analisis Pemakaian/penggunaan rumah dinas daerah	Persentase terlaksananya analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Yang Diterbitkan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00						
	Pemutakhiran data aset tetap milik pemprovsu untuk bahan neraca per 31 desember	Persentase data mutakhir Aset Tetap Milik Pemprovsu Yang Selesai Per 31 Desember	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00						
	Penyusunan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Peraturan Tentang Pengelolaan BMD Yang Disusun	5	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00						
	Visitas tentang penetapan penilaian independen di lingkungan pmda sesuai dengan permendagri nomor 21 tahun 2018	Persentase pelaksanaan visitasi tentang penetapan penilaian independen	5	Buku	0	Buku	0	Buku	0	Buku	#DIV/0!						
	Pembinaan inventarisasi dan updating data BMD sesuai dengan Permendagri nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang	Jumlah OPD Yang Melakukan Inventarisasi dan Updating BMD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	100,00						
	Pengamanan Aset Milik Pemprovsu yang bermasalah	Persentase pengamanan Aset yang Bermasalah dapat diamankan	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00						
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAA N PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Kualitas kapasitas kelembagaan meningkat</b>	98	%	95	%	98	%	98	%	100,00						
	Pembinaan gaji PNS Daerah pada SKPD di lingkungan Pemprovsu	Jumlah OPD Yang Melakukan Pembayaran Gaji Sesuai Ketentuan	49	OPD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	100,00						
	Peningkatan kualitas pelayanan sistem Cash Management System (CMS)	Persentase Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00						
	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan diterbitkan SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33	Kabupaten /Kota	100,00												
	Pengelolaan cash management system (cms) terintegrasi dengan E-Keuangan dalam penatausahaan keuangan	Persentase Integrasi CMS dengan E-Keuangan	100	%	0	%	100	%	100	%	100,00						
												<b>SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019</b>					

	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekonsiliasi	60	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	#DIV/0!	
	Penyusunan dan rekapitulasi data APBD kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekapitulasi data	33	Kabupaten /Kota	100,00							
	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	33	Kabupaten /Kota	100,00							
	Rapat Koordinasi dan rapat teknis terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Sumut	Persentase rapat dan koordinasi yang terlaksana	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	
	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen APBD tersusun tepat waktu	750	Buku	150	Buku	150	Buku	150	Buku	100,00	
	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen Perubahan APBD tepat waktu	750	Buku	150	Buku	150	Buku	150	Buku	100,00	
	Pengelolaan aplikasi E-Kuangan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan aplikasi E-Kuangan Terlaksana Dengan Baik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	
	Rekonsiliasi dan Konsinyering data dana bagi hasil pajak Provinsi Kepada Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melakukan rekonsiliasi	33	Kabupaten /Kota	100,00	SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
	Koordinasi dan pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	Jumlah OPD yang melakukan koordinasi dan pelaporan	49	OPD	49	OPD	49	OPD	49	OPD	100,00	
	Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu	Persentase Berkas BPKAD Terawat Dengan Baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	
	Pengelolaan Dokumentasi dan Konten Website BPKAD	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	

Disampaikan bahwa sejak Tahun 2021, Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga pada Tabel 22 pada kolom 9,10 dan 11 tidak dapat di isi sebagaimana mestinya.

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa :

- a. Kegiatan yang tidak memenuhi target 6 kegiatan, Kegiatan yang telah memenuhi target 62 kegiatan dan Kegiatan yang melebihi target 1 kegiatan.

- b. Program yang tidak memenuhi target 0 program, Program yang memenuhi target 0 program dan yang melebihi target 7 program
- c. Faktor penyebab tidak memenuhi target yaitu : disebabkan dilakukannya refocusing terhadap anggaran belanja kegiatan terkait terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Faktor penyebab terpenuhinya target yaitu :

- tersedianya anggaran belanja kegiatan,
- tersedianya sumberdaya pendukung dari kegiatan,
- Kegiatan segera dilaksanakan.

Dan Faktor penyebab melebihi target yaitu terealisasinya pensertifikatan tanah pemprovsu yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan kerjasama Pemprovsu dengan Badan Pertanahan Negara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra yaitu Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .
- e. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :
  - Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,
  - Tersedianya anggaran belanja kegiatan,
  - Melakukan evaluasi kegiatan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah,

pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel. 2.3 (Tabel T-C.30).**



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian besar karena dilakukan refocusing anggaran, perubahan nomenklatur dan efisiensi pagu anggaran kegiatan Badan pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya adalah untuk disesuaikan dengan proyeksi belanja yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan aplikasi pada PT. Bank Sumut sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah pada setiap saat atau secara real time.
2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi E-Keuangan yang dimulai dengan penganggaran, penggunaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta penatausahaan yang baik.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan PD sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

4. Dalam rangka pengamanan aset daerah telah dilakukan pensertifikatan tanah milik pemprov yang ditargetkan sebanyak 100 sertifikat dan realisasi sebanyak 140 sertifikat atau capaian 140%.
5. Hasil Opini BPK Tahun 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hambatan utama pada penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga operator dari luar;
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
3. Dilakukannya refocusing anggaran perangkat daerah sehingga adanya beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana;
4. Suasana kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas.

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas (Tabel.2.4), Capaian Indikator Kinerja Daerah (Tabel.2.5) dan Capaian Indikator Kinerja BPKAD Provsu (Tabel.2.6) yang dicapai antara lain yaitu :

Tabel. 2.4

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2020	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 2 Dokumen KUA dan PPAS APBD dan 2 Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD
		2.	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 50 Dokumen RKA, 100 RKA Pergeseran dan 50 Dokumen Perubahan RKA
		3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran	Tersusun 1 Dokumen APBD, 2 Dokumen Pergeseran APBD dan 1 Dokumen Perubahan APBD
		4.	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran	Diverifikasi 50 Dokumen DPA, 100 DPA Pergeseran dan 50 Dokumen Perubahan DPA
		5.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

		6.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi	1 Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya	
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$\frac{(\text{Jumlah Tanah yang bersertifikat})}{(\text{Jumlah seluruh tanah})} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	23,68 % Luas Tanah yang telah disertifikat
		10.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset	Dokumen laporan aset 49 OPD
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang P.APD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		13.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi

**Tabel. 2.5**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN 2020**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,73	1,73	3,78	208,09
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	25,35	25,35	20,59	71,10
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	19,00	3,99	3,77	94,49
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	38:62	31 : 69	21:69	68:100
6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	10,72	13,00	13,00	100,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

**Tabel. 2.6**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**  
**TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)}} \times 100\%$	Bidang Anggaran	100%
2	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	BMD dikelola dengan baik	Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	Bidang Aset	Tersedia laporan BMD Pemprovsu sesuai SAP
			Aplikasi Simbada berbasis online	Bidang Aset	Tersedia aplikasi Simbada Online untuk penatausahaan BPD Pemprovsu
			Jumlah tanah yang bersertifikat	Bidang Aset	Sertifikat tanah yang selesai tahun 2020 ditargetkan 100 Sertikat dan realisasi 140 sertifikat atau 140 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab/Kota	$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} \times 100\%$	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota
			$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota
			$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota

## **2.4. Review terhadap RKPD**

Renja Perangkat Daerah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Hasil review dapat dilihat pada **Tabel 2.7.**

Tabel 2.7 (T-C.31)

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

## PROVINSI SUMATERA UTARA

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	BPKAD	<b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran</b>	98%	5.792.110.200	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	BPKAD	<b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran</b>	98%	3.883.085.416	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Pengiriman Surat, Dokumen, Paket dan Barang Terbayar	3200 dokumen	150.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Pengiriman Surat, Dokumen, Paket dan Barang Terbayar	3200 dokumen	85.053.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah lokasi pengguna Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik yang Terbayar	4 tempat	95.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah lokasi pengguna Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik yang Terbayar	4 tempat	32.140.990	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diservis	1 paket	300.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diservis	1 paket	140.874.000	
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Berizin	30 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Berizin	30 unit	39.066.795	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	BPKAD	Persentase Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan dibayarkan	100%	1.800.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	BPKAD	Persentase Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan dibayarkan	100%	1.229.900.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Persentase ATK Yang Dibeli sesuai kebutuhan	100%	300.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Persentase ATK Yang Dibeli sesuai kebutuhan	100%	286.441.190	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Persentase Barang Yang Dicitak dan Digandakan	100%	300.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Persentase Barang Yang Dicitak dan Digandakan	100%	248.307.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Persentase Bahan Bacaan Yang Dibeli Per Bulan	100%	80.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Persentase Bahan Bacaan Yang Dibeli Per Bulan	100%	20.579.500	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia Untuk Tamu dan ASN	100%	500.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia Untuk Tamu dan ASN	100%	431.951.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	BPKAD	Persentase Rapat Koordinasi Yang Dihadiri	100%	1.883.110.200	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	BPKAD	Persentase Rapat Koordinasi Yang Dihadiri	100%	1.167.921.941	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Jumlah Kebersihan Yang Dibayar Setiap Bulan	3 orang	117.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Jumlah Kebersihan Yang Dibayar Setiap Bulan	3 orang	97.500.000	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	BPKAD	Jumlah Keamanan Yang Dibayar Setiap Bulan	3 orang	117.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	BPKAD	Jumlah Keamanan Yang Dibayar Setiap Bulan	3 orang	103.350.000	

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>98%</b>	<b>5.253.416.850</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>98%</b>	<b>2.459.076.330</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	1 paket	151.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	1 paket	186.150.000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservis	30 unit	400.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservis	30 unit	224.059.903	
	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD	BPKAD	Persentase Pembayaran Sewa Gedung Per tahun	6 bulan	4.702.166.850	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD	BPKAD	Persentase Pembayaran Sewa Gedung Per tahun	6 bulan	2.048.866.427	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Meningkatnya Efektifitas dan Produktifitas Layanan</b>	<b>98%</b>	<b>899.565.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Meningkatnya Efektifitas dan Produktifitas Layanan</b>	<b>98%</b>	<b>165.450.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD	Jumlah Pakaian Dinas Diadakan	116 pasang pakaian	306.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPKAD	Jumlah Pakaian Dinas Diadakan	116 pasang pakaian	96.550.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	BPKAD	Jumlah Pakaian Khusus Diadakan	116 baju	293.850.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	BPKAD	Jumlah Pakaian Khusus Diadakan	116 baju	0	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	Sekretariat	Persentase administrasi kepegawaian ASN BPKAD yang dikelola	100%	299.715.000	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	Sekretariat	Persentase administrasi kepegawaian ASN BPKAD yang dikelola	100%	68.900.000	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>98%</b>	<b>2.162.532.100</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>98%</b>	<b>316.107.497</b>	
	Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	Perbend Kasda	Persentase Bendahara Penerimaan mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	100%	154.594.500	Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	Perbend Kasda	Persentase Bendahara Penerimaan mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah	100%	0	
	Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	Perbend Kasda	Persentase Bendahara Pengeluaran mengikuti Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, FinaD32:D37I Pasal 4 Ayat 2	100%	168.539.000	Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2	Perbend Kasda	Persentase Bendahara Pengeluaran mengikuti Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, FinaD32:D37I Pasal 4 Ayat 2	100%	0	
	Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Perbend Kasda	Persentase ASN pengelola keuangan mengikuti sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	400.401.000	Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Perbend Kasda	Persentase ASN pengelola keuangan mengikuti sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	5.136.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	Bina Keuda	Persentase Kab/Kota mengikuti Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	100%	732.375.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	Bina Keuda	Persentase Kab/Kota mengikuti Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	100%	247.791.200	
	Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bina Keuda	Persentase OPD mengikuti Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	249.566.600	Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bina Keuda	Persentase OPD mengikuti Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	26.680.297	

	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprov	Akuntansi	Persentase OPD mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprov	100%	256.685.000	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprov	Akuntansi	Persentase OPD mengikuti Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprov	100%	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat	Persentase Peningkatan SDM Aparatur BPKAD	100%	200.371.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat	Persentase Peningkatan SDM Aparatur BPKAD	100%	36.500.000	
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dan Kinerja yang tepat waktu</b>	<b>98%</b>	<b>4.792.751.040</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dan Kinerja yang tepat waktu</b>	<b>98%</b>	<b>1.981.440.497</b>	
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja	Sekretariat	Jumlah Dokumen Lakip dan Dokumen Penetapan Kinerja Tepat Waktu	2 dokumen	39.000.000	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja	Sekretariat	Jumlah Dokumen Lakip dan Dokumen Penetapan Kinerja Tepat Waktu	2 dokumen	0	
	Penyusunan Anggaran Kas Pemrov APBD dan Perubahan APBD	Perbend Kasda	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemrov APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu	2 dokumen	39.090.000	Penyusunan Anggaran Kas Pemrov APBD dan Perubahan APBD	Perbend Kasda	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemrov APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu	2 dokumen	0	
	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Perbend Kasda	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	12 dokumen	387.520.600	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Perbend Kasda	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	12 dokumen	150.934.800	
	Pengelolaan Pajak PPN dan PPh	Perbend Kasda	Persentase peningkatan SDM pengelolaan Pajak PPN dan PPH Sesuai Dengan Ketentuan	100%	282.002.600	Pengelolaan Pajak PPN dan PPh	Perbend Kasda	Persentase peningkatan SDM pengelolaan Pajak PPN dan PPH Sesuai Dengan Ketentuan	100%	231.800.000	
	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya yang disusun Tepat Waktu	1 dokumen	246.656.800	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Semester I APBD Serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya yang disusun Tepat Waktu	1 dokumen	115.727.500	
	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Akuntansi	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dengan Baik	100%	966.277.600	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Akuntansi	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dengan Baik	100%	520.491.436	
	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemrov	Akuntansi	Persentase Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov sesuai SAP	100%	234.454.200	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov	Akuntansi	Persentase Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov sesuai SAP	100%	100.080.501	
	Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Akuntansi	Jumlah OPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Tepat Waktu	49 OPD	88.566.000	Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Akuntansi	Jumlah OPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Tepat Waktu	49 OPD	50.730.000	
	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntansi	Jumlah OPD Yang Menghadiri Diklat	49 OPD	233.742.000	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntansi	Jumlah OPD Yang Menghadiri Diklat	49 OPD	0	
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tepat Waktu	1 dokumen	1.327.947.600	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Akuntansi	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tepat Waktu	1 dokumen	544.399.360	
	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	Sekretariat	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	100%	491.254.440	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	Sekretariat	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan	100%	193.648.400	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	Sekretariat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPKAD yang tersusun	12 dokumen	199.806.400	Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	Sekretariat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPKAD yang tersusun	12 dokumen	73.628.500	

	Peningkatan Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	Sekretariat	Persentase kelengkapan dokumen Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	100%	109.982.800	Peningkatan Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	Sekretariat	Persentase kelengkapan dokumen Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD	100%	0
	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD	Sekretariat	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Pada BPKAD yang Ditindaklanjuti	100%	146.450.000	Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD	Sekretariat	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Pada BPKAD yang Ditindaklanjuti	100%	0
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>98%</b>	<b>9.573.143.400</b>	<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>98%</b>	<b>2.405.178.303</b>
	Pengadaan BMD Mempedomani Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Aset	Jumlah Pergub BMD yang berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan	1 dokumen	400.000.000	Pengadaan BMD Mempedomani Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Aset	Jumlah Pergub BMD yang berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan	1 dokumen	43.032.000
	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBM dan DKPBM	Aset	Jumlah OPD dievaluasi tentang RKBMD, RKPBM, DKBM dan DKPBM	49 OPD	550.000.000	Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBM dan DKPBM	Aset	Jumlah OPD dievaluasi tentang RKBMD, RKPBM, DKBM dan DKPBM	49 OPD	55.052.200
	Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	Aset	Jumlah Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	49 OPD	100.000.000	Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	Aset	Jumlah Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	49 OPD	38.129.730
	Penetapan dan Pengalihan Status BMD	Aset	Jumlah dokumen OPD Pemanfaatan Penetapan Status BMD	49 OPD	244.000.000	Penetapan dan Pengalihan Status BMD	Aset	Jumlah dokumen OPD Pemanfaatan Penetapan Status BMD	49 OPD	112.100.800
	Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada BMD	Aset	Jumlah OPD melakukan pengelolaan Aset dan Barang Persediaan melalui Aplikasi Simbada BMD	49 OPD	1.100.000.000	Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada BMD	Aset	Jumlah OPD melakukan pengelolaan Aset dan Barang Persediaan melalui Aplikasi Simbada BMD	49 OPD	654.302.600
	Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	Aset	Jumlah kegiatan Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	350.000.000	Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	Aset	Jumlah kegiatan Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	169.425.000
	Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu	Aset	Persentase SK Gubsu tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yan selesai	100%	450.000.000	Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu	Aset	Persentase SK Gubsu tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yan selesai	100%	239.996.940
	Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	Aset	Persentase LHP BPK RI yang ditindak Lanjuti	100%	200.020.000	Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara	Aset	Persentase LHP BPK RI yang ditindak Lanjuti	100%	179.548.300
	Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov	Aset	Persentase Sertifikasi Tanah Yang Diselesaikan	100%	4.000.000.000	Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov	Aset	Persentase Sertifikasi Tanah Yang Diselesaikan	100%	521.521.223
	Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah	Aset	Persentase terlaksananya analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Yang Ditertibkan	100%	120.000.000	Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah	Aset	Persentase terlaksananya analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Yang Ditertibkan	100%	81.920.000
	Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprov Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember	Aset	Persentase data mutakhir Aset Tetap Milik Pemprov Yang Selesai Per 31 Desember	100%	150.000.000	Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprov Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember	Aset	Persentase data mutakhir Aset Tetap Milik Pemprov Yang Selesai Per 31 Desember	100%	62.980.940

	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset	Jumlah Peraturan Tentang Pengelolaan BMD Yang Disusun	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset	Jumlah Peraturan Tentang Pengelolaan BMD Yang Disusun	1 dokumen	40.733.400	
	Visitasi Tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan Pemda Sesuai Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	Aset	Persentase pelaksanaan visitasi tentang penetapan penilaian independen	100%	100.000.000	Visitasi Tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan Pemda Sesuai Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	Aset	Persentase pelaksanaan visitasi tentang penetapan penilaian independen	100%	0	
	Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang	Aset	Jumlah OPD Yang Melakukan Inventarisasi dan Updating BMD	49 OPD	338.406.400	Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang	Aset	Jumlah OPD Yang Melakukan Inventarisasi dan Updating BMD	49 OPD	18.450.000	
	Pengamanan Aset Milik Pemprovsu Yang Bermasalah	Aset	Persentase pengamanan Aset yang Bermasalah dapat diamankan	100%	1.320.717.000	Pengamanan Aset Milik Pemprovsu Yang Bermasalah	Aset	Persentase pengamanan Aset yang Bermasalah dapat diamankan	100%	187.985.170	
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Kualitas Kapasitas Kelembagaan meningkat</b>	<b>98%</b>	<b>29.183.625.210</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Kualitas Kapasitas Kelembagaan meningkat</b>	<b>98%</b>	<b>10.255.256.808</b>	
	Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu	Perbend Kasda	Jumlah OPD Yang Melakukan Pembayaran Gaji Sesuai Ketentuan	49 OPD	577.370.800	Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu	Perbend Kasda	Jumlah OPD Yang Melakukan Pembayaran Gaji Sesuai Ketentuan	49 OPD	337.773.460	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	Perbend Kasda	Persentase Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	100%	147.827.600	Peningkatan Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	Perbend Kasda	Persentase Kualitas Pelayanan Cash Management System (CMS)	100%	0	
	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan diterbitkan SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33 kab/kota	2.095.762.000	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan diterbitkan SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33 kab/kota	893.978.751	
	Pengelolaan Cash Management System (CMS) Terintegrasi Dengan E-Kuangan Dalam Penatausahaan Keuangan	Perbend Kasda	Persentase Integrasi CMS dengan E-Kuangan	100%	393.753.600	Pengelolaan Cash Management System (CMS) Terintegrasi Dengan E-Kuangan Dalam Penatausahaan Keuangan	Perbend Kasda	Persentase Integrasi CMS dengan E-Kuangan	100%	172.250.000	
	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekonsiliasi	33 kab/kota	218.774.000	Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekonsiliasi	33 kab/kota	0	
	Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekapitulasi data	33 kab/kota	271.968.600	Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang melakukan rekapitulasi data	33 kab/kota	81.876.600	
	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	33 kab/kota	198.192.000	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	33 kab/kota	28.310.970	
	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se- Sumut	Bina Keuda	Persentase rapat dan koordinasi yang terlaksana	100%	314.284.850	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut	Bina Keuda	Persentase rapat dan koordinasi yang terlaksana	100%	9.300.000	
	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah dokumen APBD tersusun tepat waktu	1 dokumen	11.016.584.800	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah dokumen APBD tersusun tepat waktu	1 dokumen	3.033.243.271	
	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah dokumen Perubahan APBD tepat waktu	1 dokumen	8.328.819.900	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah dokumen Perubahan APBD tepat waktu	1 dokumen	3.624.598.926	

	Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan	Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan aplikasi E-Kuangan Terlaksana Dengan Baik	100%	2.750.746.860	Pengelolaan Aplikasi E-Kuangan	Anggaran	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan aplikasi E-Kuangan Terlaksana Dengan Baik	100%	1.567.274.000	
	Rekonsiliasi Dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab/Kota	Anggaran	Jumlah kab/kota yang melakukan rekonsiliasi	33 kab/kota	669.543.400	Rekonsiliasi Dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab/Kota	Anggaran	Jumlah kab/kota yang melakukan rekonsiliasi	33 kab/kota	198.811.500	
	Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah OPD yang melakukan koordinasi dan pelaporan	46 OPD	1.266.836.000	Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara	Anggaran	Jumlah OPD yang melakukan koordinasi dan pelaporan	46 OPD	35.739.330	
	Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang disusun dokumen Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota sesuai dengan peraturan berlaku	33 kab/kota	154.784.000	Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota yang disusun dokumen Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota sesuai dengan peraturan berlaku	33 kab/kota	0	
	Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota mengikuti Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33 Kab/Kota	148.376.800	Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bina Keuda	Jumlah Kab/Kota mengikuti Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33 Kab/Kota	0	
	Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD	Sekretariat	Persentase Berkas BPKAD Terawat Dengan Baik	100%	330.000.000	Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD	Sekretariat	Persentase Berkas BPKAD Terawat Dengan Baik	100%	188.450.000	
	Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	Sekretariat	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	100%	300.000.000	Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	Sekretariat	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD	100%	83.650.000	
					<b>57.657.143.800</b>					<b>37.355.373.435</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B I I I

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Nasional

Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diantaranya adalah :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN NASIONAL**

<b>Tujuan Lembaga Nasional</b>	<b>Sasaran Nasional</b>
Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;</li><li>2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan</li><li>3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.</li></ol>

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

**Tabel. 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN BPKAD PROVSU**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Optimalisasi Pengeloaan Keuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengeloaan Aset	2. Mewujudkan Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas
3. Optimalisasi Pembinaan Pengeloaan Keuangan Kab/Kota	3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Tujuan yaitu Optimalisasi keuangan, Aset dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Mewujudkan Penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan tertib administrasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD Provsu yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari APBD Provsu.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan dan 33 sub kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.





Adapun Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sesuai **Tabel 3.4**.

**Tabel 3.4**  
**TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD**

VISI		SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT							
MISI 2		BERMARTABAT DALAM POLITIK							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN						
			2019		2020		2021	2022	2023
			PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance)	Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Terkait Indikator Kinerja Utama OPD, target indikator dan rumusan perhitungannya sesuai **Tabel 3.5**

**Tabel 3.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1.	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	$\frac{(\text{Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia})}{(\text{Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia})} \times 100\%$	100%
2	BMD dikelola dengan baik	Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	100%
		Aplikasi Simbada berbasis online	Upgrade Aplikasi Simbada Online
		Jumlah tanah yang bersertifikat	64,17%
3.	Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab/Kota	$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/kota})} \times 100\%$	100%
		$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang P.APD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/Kota})} \times 100\%$	100%
		$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pel. APBD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/Kota})} \times 100\%$	100%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

##### **A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daeah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas dan fungsinya berkenaan dengan misi ke dua yaitu "Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik..." dengan tujuan "Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih" dengan sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance)". Indikator yang ingin dicapai terkait misi kepala daerah adalah "Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah" dengan target opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk tahun 2019 sampai dengan 2023.

#### **4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Renja OPD Tahun 2022.**

Adapun Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2022 dan Renja Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

###### **➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

###### **➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

➤ **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

➤ **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD;
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
11. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan.

➤ **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK);
5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas;
6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Blid, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;

5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

➤ **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
2. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

### **C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

➤ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. Pengamanan Barang Milik Daerah;
8. Penilaian Barang Milik Daerah;
9. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pengapusan Barang Milik Daerah;
11. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 4.3. Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasi anggaran dana yang tertuang dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. Adapun Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pada **Tabel 4.1**.

### 4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program,kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah seperti **Tabel 4.2** dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	100%	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>8.870.286.200</b>
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>8.870.286.200</b>
				a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	580.956.200
				b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	530.211.000
				c. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	140.524.000
				d. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	611.924.500
				e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	138.674.500
				f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	383.644.000

				g.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.128.526.500
				h.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.035.141.500
				i.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	726.050.000
				j.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	594.634.000
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	BMD dikelola dengan baik	12 Bulan		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.485.566.391</b>
					<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.485.566.391</b>
				a.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	229.525.000
				b.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	173.487.000
				c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.076.165.111
				d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	4.006.389.280
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.702.315.000</b>
				a.	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.702.315.000</b>
				b.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	915.875.000

			c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	373.966.000
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	412.474.000

#### **4.5. Indikator Kinerja Utama OPD**

Adapun target Indikator Kinerja Utama OPD terhadap Pembangunan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 antara lain :

**Tabel. 4.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD**  
**PADA PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>No.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>TARGET TAHUN 2022</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
3	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
5	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikat	43,93	64,17	84,42
6	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100	100	100
7	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

## **B A B   V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

#### **A.    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Rencana Kerja BPKAD sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

**B. Rekomendasi.**

Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing- masing bidang.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Medan,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730824 199203 1 001**



5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	160,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	160,000,000
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	18,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	50,000,000
5	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>300,000,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000,000</b>
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 dokumen	1 OPD	300,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000
5	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>1,420,375,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>950,000,000</b>
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah pakaian dinas yang dilakukan pengadaannya	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 Stel	1 OPD	348,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	400,000,000
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang diolah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	280,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	250,000,000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	299,775,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Kegiatan	1 OPD	492,400,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	492,400,000
5	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>5,319,700,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>5,500,000,000</b>
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Buah	1 OPD	150,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	40 Buah	1 OPD	700,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	700,000,000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Buah	1 OPD	307,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Orang	1 OPD	600,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	600,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	50 Item	1 OPD	400,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	400,000,000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	20 Item	1 OPD	150,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000
5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	300 Orang	1 OPD	250,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	250,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Kali	1 OPD	2,000,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,000,000,000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Dokumen	1 OPD	312,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	20 Buah	1 OPD	450,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	450,000,000
5	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>400,000,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>400,000,000</b>
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah mebel yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	117 Unit	1 OPD	400,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	400,000,000
5	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>8,199,897,600</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>4,900,000,000</b>
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	3200 Buah	1 OPD	200,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000

5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	3 Jenis	1 OPD	4,193,061,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	900,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	150 Unit	1 OPD	300,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	300,000,000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	5 Jenis	1 OPD	3,506,836,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,500,000,000
5	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>1,299,620,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD</b>	<b>100 %</b>	<b>1,240,000,000</b>
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	7 Unit	1 OPD	486,340,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	420,000,000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	17 Unit	1 OPD	610,950,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	620,000,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Unit	1 OPD	202,330,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	200,000,000
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>			<b>3,523,365,167,898</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>16,349,754,284</b>
5	02	02	1.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>7,912,446,700</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>7,946,524,000</b>
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	580,956,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	545,896,000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	530,211,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	546,000,000
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	140,524,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	381,718,000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	611,924,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	381,718,000
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	138,674,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	160,231,700
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	39 Dokumen	49 OPD	383,644,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	173,911,700

5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	8 Dokumen	49 OPD	2,128,526,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	2,322,973,000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	9 Dokumen	49 OPD	3,035,141,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	2,982,327,100
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	65,163,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	145,780,000
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	227,482,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	137,860,000
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	70,198,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	168,108,500
5	02	02	1.02		<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100%</b>	<b>2,163,020,500</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>2,175,878,284</b>
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	33 Dokumen	33 Kab/Kota	915,875,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	939,199,784
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Dokumen	33 Kab/Kota	373,966,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	374,033,000
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Dokumen	33 Kab/Kota	412,474,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	412,696,000
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	167,875,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	157,095,000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Orang	33 Kab/Kota	292,830,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 persen	292,854,500
5	02	02	1.03		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>2,842,709,000</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>1,995,200,000</b>
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	49 OPD	49 OPD	539,100,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	39,100,000
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	6 BUMD	49 OPD	34,600,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	25,000,000

5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	12 Dokumen	49 OPD	499,840,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	326,040,000
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	14 Dokumen	49 OPD	610,281,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	577,262,000
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	54,900,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	54,900,000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	692,648,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	742,498,000
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	4 Dokumen	49 OPD	411,340,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	230,400,000
5	02	02	1.04		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>2,883,941,300</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>2,328,676,000</b>
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-1, dan Belanja	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	12 Dokumen	49 OPD	153,663,950	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	155,663,950
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	726,050,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	625,986,000
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	742,903,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	737,795,300
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pengub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	594,634,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	383,156,000
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyelesaian TPTKD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	373,120,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	155,230,000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah partisipan yang hadir	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	100 Orang	49 OPD	293,569,750	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	270,844,750
5	02	02	1.05		<b>Penujng Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>			<b>100 %</b>	<b>3,505,793,153,745</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar</b>	<b>100 %</b>	<b>464,428,000</b>

5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah analisis investasi yang disusun	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	198,750,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	198,750,000
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah analisis perencanaan & pelaksanaan penerimaan pinjaman yang disusun	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	1 OPD	215,678,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	215,678,000
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Laporan	1 OPD	50,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	50,000,000
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyaluran Dana Bagi Hasil	Meningkatnya kemampuan BPKAD dalam mengelola urusan pendukung yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kabupaten/ Kota	1 OPD	3,505,328,725,745	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	0
5	02	02	1.06		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>		<b>100 %</b>		<b>1,769,896,653</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD</b>	<b>100 %</b>	<b>1,439,048,000</b>
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan inventarisasi dan analisis data keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	160,409,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	223,568,000
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	1,609,487,653	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	1,215,480,000
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>			<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>	<b>100 %</b>			<b>7,293,768,011</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>7,000,000,000</b>
5	02	03	1.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah</b>		<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu</b>		<b>100 %</b>		<b>7,293,768,011</b>	<b>PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>7,000,000,000</b>
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	400,062,660	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	400,062,660
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	2 Dokumen	49 OPD	359,964,690	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	359,964,690
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	318,508,570	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	318,508,570
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	1 Dokumen	49 OPD	246,707,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	246,940,610
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	1,076,165,111	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	1,076,169,161
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	338,737,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	338,813,000

5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	2,104,989,280	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	2,104,989,549			
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	559,758,260	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	559,758,260			
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 OPD	49 OPD	276,963,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	258,783,000			
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	48 SK	49 OPD	1,032,539,940	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	754,837,000			
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	229,525,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	229,597,000			
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	49 Dokumen	49 OPD	173,487,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	173,572,000			
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100 %	33 Kab/Kota	49 OPD	176,360,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	178,004,500			
<b>TOTAL</b>																	<b>3,572,390,881,951</b>				<b>39,249,754,284</b>